

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Ali 2008, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Asshidiqqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Edwin, Doni. et al., *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, (Jakarta: Partnership, 2005).
- Ence, Iriyanto A. Baso. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*. (Bandung: PT.Alumni, 2008).
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010).
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- "KBBI: "pelaksana tugas"". *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*.
- Keliat, Makmur. *Reformasi Kepolisian Dalam TNI-Polri Di Masa Perubahan Politik. Cet-2*. (Jakarta: Program Magister Studi Pertahanan-ITB dan Imparsial, 2008).
- Lubis, M. Solly. *Ilmu Negara*, (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju, 2007).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cetakan ke-8*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- _____. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2006).

Meagher, Dan. *'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems* (Sydney: Law Review, Vol. 36, 2014).

Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara, 1978).

Mulyosudarmo, Suwoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggung jawaban Kekuasaan, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1990).

Nugraha, Safri. et al. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta : UI Press, 2005).

Ranuwijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Setiadi, Edi. dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2013).

Situmorang, M. dan Cormentya Sitanggang. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).

Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000).

Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Wade, H.W.R and C.F Forsyth, *Administrative Law*, (New York: Oxford University Press, 1994).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *"Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia”.

_____. “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 20 “.

_____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP).

_____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Artikel

Anonim. http://id.wikipedia.org/wiki/pemerintah_daerah_di_indonesia.html, (diakses pada tanggal 26 Agustus 2018).

Anonim. https://id.wikipedia.org/wiki/Mochamad_Iriawan, (diakses pada tanggal 30 oktober 2018).

Anonim, <https://news.detik.com/berita/3807795/profil-4-calon-gubernur-jawa-barat>, (Diakses pada tanggal 14 januari 2019).

Anonim, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-3-I-P3DI-Februari-2018-207.pdf, (diakses pada tanggal 30 januari 2019)

Anonim, <https://fokus.tempo.co/read/1098950/kontroversi-m-iriawan-jadi-penjabat-gubernur-jawa-barat/full&view=ok>, (diakses pada tanggal 14 januari 2019).